

**PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT SEJAHTERA  
(GERBANG RAJA) DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN  
SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
(Studi Tentang Program Kesehatan dan Ketenagakerjaan Gerbang Raja di  
Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**SYAHBAN RIDWAN<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Pelaksanaan Gerakan Pembanguna Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Tentang Program Kesehatan dan Ketenagakerjaan Gerbang Raja di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara), dibawah bimbingan Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si dan Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum, Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) Di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat menilai bahwa program-program pembangunan kesehatan lebih banyak dirasakan dibandingkan dengan program-program ketenagakerjaan. Diantara penyebab kurang maksimalnya pembangunan ketenagakerjaan adalah keberadaan payung hukum (Perda) tentang Ketenagakerjaan, dan keterbatasan anggaran pada APBD.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Gerbang Raja*

**PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 & 33 Tahun 2004.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka otonomi daerah yang ditekankan pada azas desentralisasi dilaksanakan oleh berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu program "Gerbang Raja". Gerbang Raja merupakan konsep percepatan pembangunan Yang berbasis pemberdayaan seluruh Komponen pembangunan baik instansi pemerintah, legislatif, swasta maupun masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Permasalahan pelaksanaan program-program Gerbang Raja sebagai program pembangunan daerah tidak hanya terletak pada apakah sebuah program sudah terlaksana di kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu ukuran kesempurnaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Syahban.ridwan@gmail.com

pelaksanaan program pembangunan daerah adalah pemerataan pelaksanaan (program) pembangunan di seluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.

Kelurahan Jawa sebagai salah satu kelurahan di kabupaten Kutai Kartanegara berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Kartanegara. Sayangnya, pembangunan di Kelurahan Jawa sangat minim. Dari observasi pendahuluan diketahui bahwa pelaksanaan Gerbang Raja di Kelurahan ini menemui berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaksanaan beberapa program unggulan Gerbang Raja karena pencairan anggaran yang kurang lancar, kendala teknis pelaksanaan program unggulan tertentu, dan belum sepenuhnya terwujud *Good Governance* di kabupaten ini.

### ***Perumusan Masalah***

Berdasar uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Gerbang Raja di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Gerbang Raja di Kelurahan Jawa kecamatan Sanga sanga kabupaten Kutai Kartanegara?.

### ***Tujuan Penelitian***

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan program Gerbang Raja di Kelurahan Jawa kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Gerbang Raja di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Manfaat Penelitian***

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, mencakup manfaat secara akademis dan teoritis, serta praktis. Beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Akademis dan Teoritis:
  - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam, dan mengembangkan pengetahuan penulis.
  - b. Sebagai media pembelajaran bagi penulis dalam menuangkan hasil penelitian menjadi laporan tertulis yang memenuhi ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Mulawarman.
  - c. Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pembangunan di kelurahan Jawa Kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek dan tema penelitian sejenis.
2. Segi Praktis
  - a. Diharapkan menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Gerbang Raja.

- b. Sebagai masukan dan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Gerbang Raja, khususnya di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **TEORI DAN KONSEP**

### ***Pengertian Implementasi (Pelaksanaan)***

Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dalam arti luas mempunyai makna sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Kamus Webster dalam Widodo (2006:86) memaknai implementasi sebagai "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat melaksanakan sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu tertentu.

### ***Pembangunan***

Menurut Yuwono (2001:47) pembangunan merupakan perubahan sosial yang besar dari keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa atau perkembangan social ekonomi. Karena pembangunan merupakan suatu proses (Perubahan) maka pembangunan haruslah kesinambungan, tanpa batas akhir, meski dalam perencanaannya dapat diatur berdasar skala prioritas tertentu. Tjokroamidjojo (dalam Khairuddin, 2000:23) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

Hoemardani (dalam Khairuddin, 2000:24) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan beberapa indikator bidang kehidupan melalui perubahan struktur ekoomi dan non-ekonomi. Kartasasmita (dalam Riyadi, 2005:4) mengatakan, "Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pengertian atau definisi dari pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain, dan bersifat saling melengkapi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut terlihat bahwa pembangunan mengandung beberapa unsur atau komponen yang harus diperhatikan, yakni:

1. Usaha atau proses;
2. Peningkatan, kemajuan atau perubahan ke arah kemajuan;
3. Berkesinambungan;
4. Dilakukan secara sadar atau sengaja;
5. Terencana;
6. Untuk tujuan pembinaan (pembangunan) bangsa; dan
7. Dilakukan secara bertahap.

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi yang didukung pengorganisasian dan peran serta masyarakat sebagai salah satu subjek

pembangunan. Menurut Suradisastra (dalam Supriatna, 2000:35), pada PJPT II manusia dan masyarakat Indonesia ditempatkan sebagai titik pusat pembangunan, sekaligus sebagai modal dasar, serta sebagai faktor dominan dan determinan. Manusia Indonesia merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, kondisi ekonomi, wilayah, dan tingkat kemampuan. Sasaran utama dari pembangunan yang berorientasi pada manusia dan masyarakat adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, mandiri, dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan atau permasalahan.

### ***Kesejahteraan Sosial (Rakyat Sejahtera)***

Menurut Suharto Edi (2005:21), Kesejahteraan sosial merupakan domain, tempat berkibrah, arena, wahana, atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena dokter berperan, dan pendidikan adalah domain dimana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Demikianlah posisi kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Arthur Dunham dalam Husodo (2006:37) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai serangkaian kegiatan yang terorganisir dengan tujuan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi sejumlah kebutuhan di berbagai bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan dan berbagai hubungan sosial.

### ***Pengertian Gerbang Raja***

Gerbang Raja adalah suatu program pembangunan yang diusulkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, S.sos, MM yang dilantik sebagai bupati pada 30 Juni 2010. Gerbang Raja mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat seperti: perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah pembahasan suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori dan konsep, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah: 'Implementasi sejumlah program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun manusia di Kelurahan Jawa dengan memberdayakan seluruh komponen dan potensi masyarakat secara terencana dan terorganisir agar terwujud pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat'

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif. Sugiyono (2006:11) menyatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, satu variabel atau lebih tanpa

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya.

### **Fokus Penelitian**

1. Program Peningkatan Kesehatan, indikatornya adalah:
  - a. Adanya gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui 1 Bidan 1 Desa.
  - b. Adanya Program Desa Sehat Mandiri.
  - c. Meningkatnya program Jamkesda sampai kesemua tingkatan.
  - d. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan Puskesmas keliling.
  - e. Adanya percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
2. Program Ketenaga-kerjaan, indikatornya adalah:
  - a. Pengadaan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja”.
  - b. Pengadaan “Bursa Pencari Kerja” Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Meningkatnya program Zona Bebas Pekerja Anak.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata dari key-informan dan informan dan apa yang melatarbelakangi berperilaku para informan tersebut (pengetahuan, pikiran, perasaan, dan tindakan). Selanjutnya, berbagai data tersebut direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna), dan diverifikasi. Rangkaian pengolahan data tersebut dimaksudkan agar dapat menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan, sifat-sifat individu, atau gejala yang terjadi terhadap kelompok tertentu. Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti dari narasumber dengan cara wawancara secara langsung dengan atau tanpa panduan pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh/dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, seperti:
  - a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).
  - b. Buku-buku Ilmiah, arsip-srsip yang didapat dari instansi terkait, serta hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gerakan 1 Bidan 1 Desa***

Sebenarnya program 1 Bidan 1 Desa dengan sendirinya tercapai bila desa atau kelurahan memiliki Puskesmas atau Puskesmas Pembantu yang memenuhi standar sebagaimana diatur Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. Dalam Permenkes tersebut, Pasal 16 (ayat 3) dinyatakan bahwa Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang harus ada pada sebuah Puskesmas.

Kondisi ini telah terjadi di Kelurahan Jawa. Setelah di kelurahan ini dibangun Puskesmas Pembantu yang dilengkapi tenaga kesehatan, Bidan dan

Perawat, maka dengan sendirinya program Gerakan Anak Sehat Kutai Kartanegara melalui 1 Bidan 1 Desa juga tercapai.

### ***Program Desa Sehat Mandiri***

Bila merujuk pada Kepmenkes No 1259 tahun 2010, Kelurahan Jawa dapat diklasifikasikan sebagai Kelurahan Siaga Aktif Purnama. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan kelurahan ini menjadi Kelurahan Siaga Aktif Mandiri adalah menambah jumlah kader kesehatan, meningkatkan jumlah UKBM dan Ormas yang aktif, dan memperluas pembinaan PHBS. Indikator keberhasilan program Desa Mandiri antara lain adalah termanfaatkannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada program/kegiatan yang selaras dengan program Desa Mandiri, dan tercapainya beberapa kriteria atau indikator Desa Mandiri menurut SKPD.

### ***Program Jamkesda***

Peserta Jamkesda di Kelurahan Jawa tahun 2014 (saat penelitian ini) berjumlah 1191 peserta, setara 45,84% total penduduk. Dengan asumsi bahwa TNI, Polri, PNS, Pensiunan, dan 50% warga yang bekerja sebagai karyawan swasta telah memiliki jaminan kesehatan, maka saat ini sekitar 93,41% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. Keberhasilan program Jamkesda merupakan buah kerja keras Pemda Kukar. Pemda Kukar memiliki pemahaman bahwa Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menyadari peran strategis kesehatan bagi masyarakatnya Pemda Kukar kemudian mengembangkan Program Jamkesda menjadi sistem Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Kukar. Dengan menerapkan Peruntukan Jamkesda bagi seluruh penduduk Kukar, *Universal health coverage* berarti Pemda Kukar telah menjalankan amanat Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 (Pasal 13, ayat 1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

### ***Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan***

Puskesmas yang ada di Kecamatan Sangasanga, dan Puskesmas Pembantu yang ada di Kelurahan Jawa belum benar-benar sesuai dengan kreteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Dan sesuai dengan Permenkes tersebut, Pasal 46 (huruf b), maka Puskesmas yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan. Keberadaan Tenaga kesehatan adalah komponen pembangunan kesehatan masyarakat yang sangat diharapkan, terutama oleh masyarakat yang jauh dari pusat layanan kesehatan utama, Rumah sakit. Hal ini pula yang diharapkan oleh warga Kelurahan Jawa

### ***Sistem Kesehatan Daerah (SKD)***

Keberadaan SKD berperan sebagai penentu arah, kebijakan, prioritas dan landasan penyusunan program dan kegiatan, rujukan bagi seluruh sektor, dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan. Dengan adanya

SKD, diharapkan pembangunan kesehatan memperoleh dukungan dari semua komponen daerah: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

### ***Program Ketenaga-kerjaan***

#### ***Pengadaan Klinik Tenaga Kerja***

Klinik Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan program SKPD ini untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja sehingga masa tunggu memperoleh pekerjaan dapat dipersingkat. Tetapi program ini belum terlaksana dan tersosialisasikan dengan baik. Keberadaan program pembangunan Klinik Tenaga Kerja Gerbang Raja ternyata juga belum banyak diketahui masyarakat, bahkan oleh pegawai kelurahan. Dalam kondisi seperti ini Klinik Tenaga Kerja atau BLK setidaknya memiliki 2 peran strategis, yaitu: Meningkatkan kompetensi para pencari kerja, dan memberikan keterampilan bagi para mantan karyawan yang menjadi korban pengurangan karyawan atau PHK sehingga dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan lain (menjadi karyawan lagi) di industri lain atau untuk menjadi wira usahawan pada bidang yang diminatinya.

#### ***Pengadaan Bursa Kerja***

Peluang bagi para pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan relatif besar di Kukar, karena jumlah lowongan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah peminatnya. Namun, bagi perusahaan kondisi semacam ini mungkin dianggap kurang ideal untuk sebuah bursa kerja. Bagi perusahaan, semakin banyak kandidat yang memperebutkan sebuah formasi pekerjaan berarti semakin besar pula peluang mereka untuk memperoleh kandidat terbaik. Karna Mendatangkan pencari kerja dari seluruh Kukar memang bukan hal mudah, mengingat luasnya wilayah Kukar, Jarak antara desa/kelurahan para pencari kerja dengan tempat penyelenggaraan Bursa Kerja

#### ***Meningkatnya Program Zona Bebas Pekerja Anak***

Program ZBPA merupakan program unggulan Gerbang Raja yang merupakan kelanjutan dari program Gerbang Dayaku. Mengingat penting dan strategisnya program tersebut dalam menjamin hak-hak anak di Kukar maka program tersebut terus dilaksanakan pada masa Gerbang Raja. Hasil penelitian diperoleh data dan informasi bahwa Kelurahan Jawa merupakan Zona Bebas Pekerja Anak, di kelurahan ini tidak terdapat pekerja yang merupakan anak usia sekolah.

## **PENUTUP**

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gerbang Raja merupakan grand strategy dalam RPJMD sebagai tahapan RPJPD Kutai Kartanegara, serta bagian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Penyusunan Gerbang Raja didasarkan pada hasil evaluasi program Gerbang Dayaku, dielaborasi dengan isu-isu strategis daerah, serta

- visi dan misi Bupati periode 2010 – 2015. Selanjutnya, Gerbang Raja menjadi acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dan RKD Kukar. Keberhasilan pelaksanaan Gerbang Raja dapat diketahui dari capaian indikator keberhasilan tiap-tiap program yang ditetapkan saat penyusunan program-program tersebut.
2. Program-program pembangunan bidang kesehatan dan ketenaga-kerjaan merupakan program prioritas dalam upaya mencapai misi ke-2 Gerbang Raja, Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Secara umum, masyarakat menilai bahwa program-program pembangunan kesehatan lebih banyak dirasakan (berhasil) dibandingkan dengan program-program ketenagakerjaan. Diantara penyebab kurang maksimalnya pembangunan ketenagakerjaan adalah keberadaan payung hukum (Perda) tentang ketenagakerjaan, dan keterbatasan anggaran pada APBD.
  4. Program '1 Bidan 1 Desa' merupakan program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program 1 Bidan 1 Desa dapat terlaksana dengan baik, seiring dengan beroperasinya Puskesmas Pembantu di Kelurahan Jawa, maka dengan sendirinya program gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui 1 Bidan 1 Desa telah tercapai.
  5. Program desa sehat mandiri telah terlaksana di Kelurahan Kampung Jawa, bila merujuk pada Kepmenkes No 1259 tahun 2010, Kelurahan Jawa dapat diklasifikasikan sebagai Kelurahan Siaga Aktif Purnama. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan kelurahan ini menjadi Kelurahan Siaga Aktif Mandiri adalah menambah jumlah kader kesehatan, meningkatkan jumlah UKBM dan ormas yang aktif, dan memperluas pembinaan PHBS.
  6. Peningkatan Program Jamkesda di Kelurahan Kampung Jawa tergolong sukses karena hampir seluruh penduduk kelurahan Jawa telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda, sesuai dengan peraturan bupati seluruh warga kutai kartanegara yang ber KTP dan ber KK kukar.
  7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga saat ini cukup baik, tetapi belum benar-benar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan karena masih kurangnya tenaga kesehatan.
  8. Sistem Kesehatan Daerah atau SKD telah berjalan di Puskesmas Sangasanga, saat ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BAPPEDA telah membangun sistem E-Planig dan E-Budgeting yang telah on-Line untuk memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi dan sistem ini telah berjalan di Puskesmas Sangasanga.
  9. Program Zona Bebas Pekerja Anak, dimana program tersebut telah terlaksana sejak masa Gerbang Dayaku dan Sekarang tinggal mempertahankanny, di Kelurahan Kampung Jawa itu sendiri telah melaksanakan Program Zona Bebas Pekerja Anak sejak masa Gerbang Dayaku dan program ini tergolong sukses dilaksanakan.
  10. Program Klinik Tenaga Kerja belum tersosialisasikan dan belum terlaksana, di Kelurahan Kampung Jawa. saat ini Klinik Tenaga Kerja baru dibangun di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa.



11. Bursa Tenaga Kerja dinilai kurang efektif oleh para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Karena kurangnya antusias para pencari kerja juga akibat jarak yang cukup jauh dan juga minimnya informasi dan juga sangat merugikan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
12. Aparatur pemerintahan Kelurahan Jawa cukup memahami perannya dalam pembangunan, sebagai pihak yang bertanggung-jawab kepada Bupati sekaligus sebagai bagian masyarakat Kelurahan Jawa. Secara umum, Pegawai Kelurahan telah memahami arah dan kebijakan pembangunan Gerbang Raja.
13. Beberapa kendala yang menghambat pencapaian indikator keberhasilan program pembangunan kesehatan dan ketenaga-kerjaan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Jamkesda: Keterbatasan anggaran dan Sosialisasi (pemahaman) tentang Program Jamkesda
  - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Keterbatasan anggaran, tenaga kesehatan, dan kurangnya dukungan dari pihak lain
  - c. Program Desa Mandiri Kesehatan: Kekurangan SDM dan dukungan dari pihak lain (swasta dan masyarakat)
  - d. Pengadaan Klinik Tenaga Kerja: Kekurangan anggaran dan SDM
  - e. Pengadaan Bursa Kerja: Kurangnya kompetensi, serta antusiasme para pencari kerja dan Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja

### **Saran**

Saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan koordinasi antar SKPD agar tercipta sinergi antar program pembangunan. Untuk itu, Peran Bappeda sebagai perencana, koordinator, dan evaluator program pembangunan perlu lebih ditingkatkan.
2. Perlu dilakukan penambahan tenaga kesehatan (dokter) dan pengadaan fasilitas rawat inap di Kelurahan Jawa atau Kecamatan Sangasanga. Untuk itu, Pemda Kukar perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau imbalan tertentu bagi tenaga kesehatan agar bersedia ditempatkan di kelurahan ini.
3. Perlu sosialisasi Jamkesda secara lebih luas dan mendalam, Penambahan anggaran untuk Jamkesda, dan peningkatan koordinasi serta pengawasan Rumah Sakit rekanan Jamkesda agar memberikan layanan lebih baik untuk meningkatkan kepuasan peserta Jamkesda.
4. Perlu percepatan pengadaan Klinik Tenaga Kerja, dan pengembangan fungsinya sebagai tempat menyiapkan tenaga kerja, dan sebagai balai latihan kerja untuk melahirkan wira usaha baru.
5. Perlu dibangun Bursa Tenaga Kerja On-line untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja secara lebih cepat, berkelanjutan, dan aktual, sehingga waktu yang diperlukan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan idamannya dapat dipersingkat.
6. Perlu dilakukan pendekatan sosio-kultural terhadap para pencari kerja agar mereka bersedia ditempatkan (bekerja) di luar desa/kecamatan mereka.

7. Perlu dilakukan kajian atau penelitian tentang efektivitas koordinasi antar SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Husodo, Siswono Yudo. 2006. *Membangun Negara Kesejahteraan, makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE)*. Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: liberty yogyakarta.
- Milles, Matthew B. & Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan Tjejep Rohendi Rohidi, Cetak Kuning, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimen. 1998. *Komunkasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi dan Deddy S.B. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I.Nyoma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat: CV. Citra Utama*.
- Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Riseka Cipta.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Prof, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses) Cet 1*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Clogaps Dipornegoro University, Semarang.

### **Dokumen-dokumen :**

- Dokumen Kependudukan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga sanga Tahun 2014
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kelurahan Jawa Tahun Anggaran 2014
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/10 tentang *Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif*

- Kutai Kartanegara Dalam Angka 2010, BPS dan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kutai Kartanegara Dalam Angka 2014, BPS dan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kukar 2013
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 143 Tahun 2012 tentang *Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2012 tentang *Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang *Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang *Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang *Pusat Kesehatan Masyarakat*
- Presentasi Isi RPJMD Kukar, 2010, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
- Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 2014, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*

**Sumber Internet :**

- Agus R., Djumadi., dan Fitriyah, N., 2014, Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Program Gerbang Raja di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (4):2181-2192, ISSN2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id.
- Bappeda.KutaiKartanegarakab.go.id/gerbangraja/php (diakses 8 Maret 2013)

<http://beritakaltim.com/> February 6, 2015, Anggaran jamkesda Kukar Mencapai Rp94 Miliar

<http://dinkes.kutaikartanegarakab.go.id>, 2014

<http://kaltim.antaraneews.com/capaian-kegiatan-pembangunan-kukar-2012-1>

[http://kaltim.tribunnews.com,2014\)/12/03/pencari-kerja-tolak-ditempatkan-luar-te](http://kaltim.tribunnews.com,2014)/12/03/pencari-kerja-tolak-ditempatkan-luar-te)  
nggarong

<http://www.kutaikartanegara.com/gerbangdayaku/> Jum'at, 13 Pebruari 2015

[http://www.kutaikartanegarakab.go.id/sekilas\\_program\\_gerbang\\_rajal](http://www.kutaikartanegarakab.go.id/sekilas_program_gerbang_rajal)

[http://www.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/static/sekilas\\_kutai\\_kartanegara](http://www.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/static/sekilas_kutai_kartanegara)

[http://www.poskotakaltim.com/Pengangguran di Kukar Capai 23 Ribu Jiwa.](http://www.poskotakaltim.com/Pengangguran_di_Kukar_Capai_23_Ribu_Jiwa.2014-03-05)  
2014-03-05

<http://www.vivaborneo.com/warga-kutai-kartanegara-terbantu-jamkesda.htm>.  
August 9, 2012